**PERCERAIAN SEBAGAI PILIHAN RASIONAL:
KASUS PERCERAIAN DI DESA TANAH MERAH, KUPANG – NTT**

Chris S. Oiladang

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang
e-mail : dewata_chris@yahoo.co.id

ABSTRAK. Perceraian adalah realitas sosial yang mempunyai dua sisi. Di satu sisi bersifat negatif karena bertentangan dengan hakekat perkawinan, dan menimbulkan sejumlah akibat yang tidak diharapkan. Di sisi lain bersifat positif karena perceraian sebagai solusi konflik antara suami-istri, bahkan dengan keluarga. Sisi positif atau negatif fakta tersebut juga berdasarkan pada acuan hukum. Walaupun hukum agama (Kristen) melarang perceraian, namun larangannya lebih bersifat himbauan moral. Di sisi lain adanya peluang perceraian menurut hukum adat yang menawarkan sejumlah jalan keluar dari problem berkeluarga. Pelaku berada dalam dua kekuatan hukum tersebut yang saling bertolak belakang. Menghadapi situasi demikian, individu mempunyai kehendak bebas untuk memilih dari berbagai alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Praktik Perceraian lebih mengacu kepada hukum adat yang dipandang sebagai pilihan rasional., karena lebih dapat menjawab kebutuhannya dalam berkeluarga. Menyangkut tingkat pilihan rasional, maka tindakan sosial dalam kasus kawin-cerai tersebut adalah sesuai tipe Rasionalitas Instrumental (Zweckrationalitat), yaitu kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan tertentu. Baik tujuan itu sendiri maupun segala tindakan yang diambil dalam rangka tujuan itu, dan akibat-akibat sampingan yang akan timbul, semuanya dipertimbangkan secara rasional.

Kata kunci : Perceraian, pilihan rasional

***DIVORCE AS A RATIONAL CHOICE:
Divorce Cases in the Tanah Merah Village, Kupang – NTT***

ABSTRACT. Divorce is a social reality that has two sides. On one side is negative because it conflicted with the nature of marriage, and raises a number of unexpected consequences. On the other hand are positive because of divorce as a solution to the conflict between husband and wife, even with family. Positive or negative side of this fact is also based on a legal reference. Although the law of religion (Christianity) forbade divorce but the ban is more moral appeal. On the other hand the chances of divorce under customary law that offers some way out of a family problem. Offender is present in the two power laws are contradictory. Facing this situation, the individual has free will to choose from a variety of alternatives available to achieve certain goals. Divorce is more referring to the

practice of customary law which is seen as a rational choice, because it can answer the needs in the family. Regarding the level of rational choice, the social action in case of divorce, it is the appropriate type of Instrumental Rationality (Zweckrationalitat), the rational behavior directed to the achievement of a particular purpose. Both end in itself nor any actions taken in the context of that goal, and the side effects that will arise, all taken into consideration in a rational way.

Keywords: Divorce, rational choice

PENDAHULUAN

Dalam lembaga perkawinan seorang laki-laki dengan seorang atau beberapa orang wanita bebas berhubungan seksual, karena hubungan mereka telah mendapat legitimasi secara sosial dan secara hukum. Selain itu secara sosiologis, status mereka yang tidak menikah, baik pria maupun wanita akan mendapat penilaian yang bersifat negatif. Hal itu juga menjadi alasan bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

Bagi masyarakat Indonesia, umumnya perkawinan merupakan jalan masuk untuk mendapatkan anak yang juga memotivasi seseorang membentuk keluarga. Anak yang lahir melalui lembaga perkawinan yang sah adalah anak yang sah, ia dapat diterima dengan baik dalam kehidupan sosial, ia layak dan sah secara hukum dengan segala konsekuensinya. Lain halnya dengan anak yang lahir di luar lembaga perkawinan, mereka mempunyai status sosial dan status hukum yang rendah bahkan menjadi bahan pergunjungan masyarakat. Keluarga yang tidak memperoleh keturunan sering menjadi masalah karena dipandang sebagai tragedi bagi wanita maupun pria.

Pembentukan keluarga melalui lembaga perkawinan menunjukkan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berbudaya. Untuk terciptanya social equilibrium, mereka berinteraksi dengan dasar norma-norma sosial. Misalnya dalam menyalurkan kebutuhan seksualnya secara bermartabat adalah melalui lembaga perkawinan. Perkawinan adalah suatu proses, yang dalam setiap rentetan atau tahapan dalam urusan proses perkawinan adalah sarat dengan makna sosiologis.

Secara psikologis, setiap orang yang membentuk keluarga melalui lembaga perkawinan yang sah mendapatkan kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikisnya. Di sana mereka dapat mencurahkan dan memperoleh kasih sayang, dapat melindungi dan dilindungi, saling mencurahkan isi hatinya kepada pasangannya (Walgito, 2000), dan juga adanya kemungkinan untuk mendapat kepastian akan kelanjutan keturunannya. Dalam pandangan Hukum, Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No 1/1974, Psl 1). Lembaga perkawinan tidak saja bermakna biologis, psikologis, dan sosiologis, tetapi bahkan bermakna religius.